

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bangun, Zakaria. 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Revita aditama.
- Haris, Syamsuddin Ed. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Krismantini, dkk, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nawawi, Ismail,.2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Jakarta : Gramedia.

- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Rawasita, Reny. 2009. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Rumesten, Iza, 2012. *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Sriwijaya : Universitas Sriwijaya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Revita aditama.
- Soemarmi, 2016. Amiek. *Buku Ajar Hukum Perikanan*. Semarang: Undip Press.
- Rawasita, Reny. 2009. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono. 2009. *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Zein, Yahya Ahmad, dkk, 2016. *Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang*. Jakarta : Thafa media.

Artikel Ilmiah

Abdullah, Alexander. “Desentralisasi dan Undang-Undang Otonomi Daerah di Era Reformasi”. Jurnal Hukum, Volume 3 No.1 Januari 2010.

Ibnu Bela Yuliawan, Amiek Soemarmi, Dwi Purnomo. “Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati”. Diponegoro Law Review. Volume 5 No. 2 Tahun 2016.

Hidayat, Syarif. “Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah”, Jentera Jurnal Hukum, Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006.

Hikmawati. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik”. Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013.

Panjaitan, Saut P. “Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang Untuk Memperoleh Informasi dan Berkomunikasi”. Jurnal Simbur Cahaya, No. 42 Tahun XV Mei 2010.

Rumesten RS, Iza. “Relevansi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Pembentukan Paeraturan Perundang-Undangan Yang Responsif”. Jurnal Simbur Cahaya, No.42 Tahun XV Mei 2010.

Saraswati, Retno, “Implementasi dan Permasalahan Produk Hukum di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 36 No. 3 Tahun 2007

Saraswati, Retno, “Implikasi Yuridis Terhadap Pengawasan Perda Dalam Konsteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41 No. 3 Tahun 2012

Rumesten RS, Iza. “Relevansi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Pembentukan Paeraturan Perundang-Undangan Yang Responsif”. Jurnal Simbur Cahaya, No.42 Tahun XV Mei 2010,

Website

Anonim. 2015. “Arti Pemerintah”. Dalam <http://pemerintah.net/arti-pemerintah/>, di akses pada tanggal 09 Oktober 2017

Angga Nugraha.2012.”Mengenal Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”. Dalam <http://fishmate.blogspot.co.id/2012/08/mengenal-wilayah-pengelolaan-perikanan.html>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perikanan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang